

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asch, Peter, 1983, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Willey & Sons Inc, Canada.
- Banks, Erik, 2004, *Corporate Governance: Financial Responsibility, Controls and Ethics*, Palgrave Macmillan, New York.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- International Finance Corporation (IFC), 2018, *Indonesia Corporate Governance Manual*, 2nd Edition, IFC, Jakarta.
- Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan usaha)*, Srikandi, Surabaya.
- Lubis, Andi Fahmi, *et al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, “Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and Interlocking Directorates”, *The Policy Roundtables*, DAF/COMP (2008).

Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*, OJK, Jakarta.

Scherer, F.M., 1994, *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC.

Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soemitro, Roni Hanitojo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Ahmar, Nurmala, *et al*, “Satu Dekade Investigasi Interlocking Directorate: Sebuah Model Deteksi Praktik Monopoli”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 7, No. 3, 2016

Ansari, Teuku Syahrul, *et al*, “SOEs Under the Soeharto New Order Regime and Reformasi Era”, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 5, 2020

Barzuza, Michal dan Quinn Curtis, “Board Interlocks and Corporate Governance”, *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 39, Issue 3, 2015.

Borgatti, Stephen P. dan Pacey C. Foster, “The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology”, *Journal of Management*, Vol. 29, No. 6, 2003.

- Bork, Robert H., The Goals of Antitrust Policy, *The American Economic Review*, Volume 57, Issue 2, Papers and Proceedings fo the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Associations, Mei 1967.
- Davis, Gerald F., “The Significance of Board Interlocks for Corporate Governance”, *Corporate Governance an International Review*, Vol. 4, No. 3, July 1996.
- Desilia, Monica, “Pengaruh Interlocking Directorate Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”, *Artikel Ilmiah STIE Perbanas*, Surabaya, 2016.
- Dooley, Peter C., “The Interlocking Directorate”, *The American Economic Review*, Vol. 59, No. 3, Juni 1969.
- Fachri, Faisal dan Iwan Joesoef, “Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019), *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2 No. 1, Februari 2021.
- Gabrielsen, Tommy S, *et al.*, “Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention”, *European Law Review*, Vol. 36, Issue 6, 2011.
- Gerber, Benjamin M., “Enabling Interlock Benefits While Preventing Anticompetitive Harm: Toward an Optimal Definition of Competitors Under Section 8 of the Clayton Act”, *Yale Journal on Regulation*, Vol. 24, No. 1, 2007.
- Haunschild, Pamela R. dan Christine M. Beckman, “When Do Interlocks Matter? : Alternate Sources of Information and Interlock Influence”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 43, No. 4, Dec 1998.
- Jacobs, Michael E., “Combating Anticompetitive Interlocks: Section 8 of the Clayton Act as a Template for Small and Emerging Economic”, *Fordham International law Journal*, Vol. 37, No. 3, 2014.
- Ma’arif, Syamsul, “Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*.
- Melanie, Dinni, “Efektifitas Pengaturan Jabatan Rangkap di BUMN Ditinjau dari Regulasi dan Praktek” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 5, 2011.
- Pasaribu, Manaek SM, “Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement,” *ERIA Discussion Paper Series 04*, Januari 2016.

Petersen, Vidir, "Interlocking Directorates in the European Union: An Argument for Their Restrictions", *European Business Law Review*, Vol. 27, No. 6, 2016.

Pratiwi, Risanti Suci, "Legalitas Jabatan rangkap Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 4, Juli 2019.

Rifai, Badriyah, "Mencermati Isi dan Visi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli", *Jurnal Hukum*, No. 17, Vol. 8, 2001.

Samawati, Putu, "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 3, September 2017.

Stigler, George, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, The Journal of Political Economy, Volume 65, Issue 1, Februari 1957.

Thepot, Florence, *et al*, "Interlocking Directorates and Anticompetitive Risks: An Enforcement Gap in Europe?", *Concurrences*, No. 1, 2016.

Travers. Jr., Arthur H., "Interlocks in Corporate Management and the Antitrust Law", *Texas Law Review*, July 1968, Vol. 46, No. 6.

Valce, Valeria, "Interlocking Directorates: An Italian Antitrust Dilemma", *Journal of Competition Law & Economics*, May 2013, Vol. 9, No. 2.

Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 4, Oktober-Desember, 2014.

C. Tugas Akhir

Johansyah, Achmad, 2016, Jabatan rangkap Direksi dan/atau Komisaris Perbankan yang Diatur oleh POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Kertawirja, Zakiyah Maulida, 2020, Hubungan Afiliasi Melalui Jabatan Rangkap Antara Pelaku Usaha Yang Bersaing (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dan Amerika Serikat, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nababan, Novi Nauli, 2016, Tinjauan Hukum Yuridis Akibat Hukum Terhadap Jabatan Rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta, Jakarta.

Tampubolon, Iin Parlina Y, 2010, Analisis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 7 Tahun 2010 Tentang Rangkap Jabatan (Studi Kasus: Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Group Cineplex dan PT JICT, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

D. Makalah/Pidato

Rachbini, Didik J., 1999, *Konsentrasi Ekonomi dan Masalah Monopoli*, Makalah dalam Seminar Persaingan Sehat, Jakarta: 18 Mei 1999.

E. Internet

Anonim, CNN Indonesia, “Kenaikan Harga Tiket Pesawat Sempat Tembus 120 Persen”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-semptat-tembus-120-persen> , diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

CNN Indonesia, “KPPU Setop Penyelidikan Rangkap Jabatan Direksi Garuda”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826190608-92-424794/kppu-setop-penyelidikan-rangkap-jabatan-direksi-garuda> , diakses pada 22 Agustus 2022

Hukumonline, “KPPU Perlu Waspada Kebijakan Pemerintah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-perlu-waspada-kebijakan-pemerintah-lt4c0cce4db275f?page=all> , diakses pada 23 Agustus 2022

Kementrian Badan Usaha Milik Negara, “*Klaster Industri*”, <https://bumn.go.id/portfolio/cluster> , diakses pada 29 Agustus 2022

Rob Alport, “*UK: Interlocking Directorates: Looking for Signs of Collusion, Conflict of Interest and Overboarding*”, <https://www.mondaq.com/uk/directors-and-officers/853280/interlocking-directorates-looking-for-signs-of-collusion-conflict-of-interest-and-overboarding> , diakses pada 24 Agustus 2022

Siaran Pers KPPU No. 22/KPPU-PR/III/2021, “Tekankan Pencegahan, KPPU Sarankan Kementrian BUMN Untuk Mencabut Aturan yang Memperkenankan Rangkap Jabatan”, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Siaran-Pers-No.-22_KPPU-PR_III_2021.pdf , diakses 15 Agustus 2022.

Tahir Saleh, “*Begini Strategi Garuda di Sriwijaya*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190120104950-4-51482/begini-strategi-garuda-di-sriwijaya> , diakses pada 22 Agustus 2022

Tirto, “*Siapa Untung dan Buntung Dari Aksi Gandengan Garuda-Sriwijaya*”, <https://tirto.id/siapa-untung-dan-buntung-dari-aksi-gandengan-garuda-amp-sriwijaya-dacC> , diakses pada 22 Agustus 2022

Yohana Artha Uly, “KPPU Minta Erick Thohir Cabut Aturan Komisaris BUMN Bisa Rangkap Jabatan”,
<https://money.kompas.com/read/2021/03/22/210400326/kppu-minta-erick-thohir-cabut-aturan-komisaris-bumn-bisa-rangkap-jabatan>, diakses 15 April 2022.

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia, “Ada Aroma Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada-aroma-kartel-dalam-kenaikan-harga-tiket-pesawat> , diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

G. Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi

H. Laporan dan Sumber Lainnya

Fox, Eleanor, 1999, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, tidak dipublikasikan.

Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia: Indonesian Competition Report, 2000, Elips.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “*OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*”, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en>